



#2

Mencacah di Kota Balikpapan: Sekelumit Kisah dari Kota Terpadat di Kalimantan Timur

Nurbaety Setram & Lindawati

A. Pengantar

Dampak munculnya serangan wabah pandemi Covid-19 sangat tidak menentu sehingga perlu dicarikan solusi. Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021 dan 2022 mencetuskan tiga reformasi struktural, yaitu reformasi sistem kesehatan, reformasi sistem kebencanaan, dan reformasi sistem perlindungan sosial yang menyeluruh bagi seluruh penduduk. Reformasi sistem perlindungan sosial diperlukan sebagai perbaikan mekanisme pelaksanaan program perlindungan sosial bagi warga negara berdasar kerentanan agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat waktu, mudah, akuntabel, dan responsif terhadap kondisi bencana. Enam prasyarat reformasi sistem perlindungan sosial dengan prasyarat utama adalah transformasi data menuju registrasi sosial ekonomi (Regsosek) seluruh penduduk.

N. Setram,* & Lindawati

*Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, *e-mail*: nurb003@brin.go.id

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional

Setram, N., & Lindawati. (2023). Mencacah di kota Balikpapan: sekelumit kisah dari kota terpadat di Kalimantan Timur. Dalam Humaedi, M. A., Imron, D. K. & Pramono, A. (Ed.), *Mencatat untuk Membangun Negeri Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Jilid 2 Indonesia Tengah-Barat* (23–52). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.777.c704 ISBN: 978-623-8052-95-0 E-ISBN: 978-623-8052-99-8

Di Kota Balikpapan, komunikasi antara BPS dengan masyarakat setempat terjalin dengan baik sehingga masyarakat tidak sungkan untuk menyampaikan pendapat, kritik, ataupun masukan terhadap petugas BPS. Pendataan untuk basis data semacam ini adalah yang pertama kali dilakukan. Sebelumnya terdapat pendataan serupa tetapi tidak menyeluruh. Oleh karenanya, sebelum pendataan awal dimulai, dilakukan rakorda Regsosek yang dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Balikpapan, BPS Kota Balikpapan, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bentuk koordinasi, kolaborasi, dan sinergi dalam menyukseskan pelaksanaan Regsosek di Kota Balikpapan.

B. Memotret Balikpapan, Kota dengan Keragaman

Kota Balikpapan memiliki letak yang strategis dan akan menjadi gerbang utama menuju Ibu Kota Indonesia yang baru, dengan keberadaan Pelabuhan Semayang dan Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman. Berdasarkan Perda Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan dalam Wilayah Kota Balikpapan, secara administratif wilayah Kota Balikpapan terdiri dari enam kecamatan dan 34 kelurahan. Enam kecamatan tersebut antara lain Balikpapan Selatan, Balikpapan Timur, Balikpapan Utara, Balikpapan Tengah, Balikpapan Barat, dan Balikpapan Kota. Jumlah penduduk Kota Balikpapan tahun 2020 sekitar 688.318 jiwa dan menjadi 695.287 jiwa tahun 2021, dengan laju pertumbuhan 1,35 persen (2020–2021). Kecamatan Balikpapan Tengah merupakan area terpadat, yakni 19 kali lebih padat dibandingkan kecamatan Balikpapan Barat yang dihuni sekitar 512 jiwa per km². Dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 1,357 jiwa/km², Balikpapan menjadi kota terpadat di Provinsi Kalimantan Timur (BPS Kota Balikpapan, 2022).

Kota yang sering kali dikenal dengan julukan kota minyak ini juga memiliki berbagai keragaman, baik secara geografis maupun kultural. Secara geografis, Balikpapan memiliki wilayah yang berbukit-



Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2021); Google (t.t.).

Gambar 2.1 Peta Kota Balikpapan

bukit dengan wilayah landai terdapat di sekitar aliran sungai dan pesisir pantai. Kota yang merupakan salah satu wilayah tersibuk di Kalimantan Timur ini dapat dikatakan sebagai pusat para pendatang. Penduduknya berasal dari beragam suku dan daerah, seperti Jawa, Sulawesi, dan Sumatra sehingga tidak heran jika makanan khas dari daerah lain, seperti Gudeg, Coto Makassar, Pecel Pincuk pun sangat mudah dijumpai di kota ini.

Selain kota minyak, Kota Balikpapan juga dikenal sebagai Kota Pendidikan yang menjadi tujuan utama para pelajar karena kualitas pendidikan yang lebih baik dibanding dengan daerah di sekitarnya. Akan tetapi, penyebaran lembaga pendidikan tersebut tidak merata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, prasarana dan sarana, maupun ketenagaan pendidikan. Hal ini mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kota Balikpapan dengan munculnya sekolah favorit dan sekolah yang kurang favorit. Masyarakat yang hidupnya biasa-biasa saja tetap hanya mampu menyekolahkan putra putrinya pada sekolah negeri yang gratis. Orang tua yang bekerja sebagai buruh harian lepas tidak pernah mimpi untuk menyekolahkan anaknya di sekolah favorit. Para orang tua tersebut hanya berharap

dapat menyekolahkan anaknya di sekolah negeri yang gratis agar kehidupan anak-anaknya kelak dapat lebih baik dari orang tuanya.

Dalam memantau pelaksanaan kegiatan Regsosek di Kota Balikpapan, Tim mengunjungi beberapa wilayah kecamatan, yakni Balikpapan Kota, Balikpapan Utara, dan Balikpapan Barat. Ketiga wilayah tersebut memiliki karakteristik dan kondisi sosial yang khas pada masing-masing wilayah. Kecamatan pertama adalah Balikpapan Kota. Tim menelusuri dua wilayah perkampungan yang berada di sekitar pantai, tepatnya di Kelurahan Klandasan Ulu dan Kelurahan Damai. Rumah penduduk di sekitar pantai adalah rumah panggung yang terbuat dari kayu, ketika pasang air laut akan menerjang kolong-kolong rumah tersebut dan meninggalkan sampah ketika air surut. Bau menyengat dan tikus-tikus besar berkeliaran menjadi hal yang lumrah. Wilayah ini sarat dengan kemiskinan dan permasalahan sosial lain. Tingkat perceraian yang cukup tinggi juga menjadi pendorong kemiskinan di area ini.

Area lainnya adalah wilayah perkebunan di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara. Warga di wilayah ini sebagian



Foto: Lindawati (2022)

Gambar 2.2 Pemandangan Pemukiman di Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota

merupakan migran yang berasal dari Jawa Timur. Umumnya, warga datang sekitar tahun 1990 dan hingga saat ini menetap di Balikpapan untuk berkebun, menjadi buruh, ataupun melakukan pekerjaan lain, seperti berdagang. Tempat ini dahulu menjadi salah satu tempat lokalisasi, tetapi bangunan lokalisasi kemudian diruntuhkan oleh pemerintah setempat. Pemandangan daerah ini sekilas terlihat sangat sederhana. Dinding rumah warga terbuat dari kayu, atap dari asbes, dan lantai belum dikeramik. Namun, ternyata warga dengan kondisi rumah seperti itu memiliki lahan perkebunan yang cukup luas dan kendaraan roda empat. Jika ditanyakan oleh PPL, pemilik rumah cenderung menutupi aset yang dimiliki. Peran dari ketua RT dalam membantu petugas memeriksa data menjadi sangat bermakna pada kawasan ini.

Warga di daerah ini tidak begitu menguasai teknologi ataupun berminat terhadap media sosial (medsos). Program-program pemerintah yang disampaikan melalui medsos atau berbasis elektronik, nyaris tidak diketahui apalagi diikuti oleh warga setempat. Beberapa warga juga cukup awam dengan perbankan dan memilih untuk menyimpan uang yang dimilikinya dalam tabung galon air



Foto: Lindawati (2022)

Gambar 2.3 Pemandangan Pemukiman di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara

mineral. Hal ini diketahui saat warga tersebut terkena musibah kebakaran, uang simpanannya rusak dalam tabung galon tersebut. Selain itu, jarak rumah ke rumah juga relatif jauh, dengan kondisi berbukit dan sebagai jalan masih berupa tanah liat, menjadi licin dan sulit didatangi oleh petugas dalam kondisi hujan sehingga pendataan terhenti ketika cuaca buruk.

Kawasan lainnya adalah Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, merupakan pemukiman warga yang berada dekat dengan pelabuhan. Kontur wilayahnya berupa area perbukitan yang berada dekat tepian laut. Daerah ini juga dikenal sebagai Gunung Bugis karena kontur wilayah perbukitan tersebut dan mayoritas warga merupakan suku Bugis. Wilayah ini cukup ramai, banyak pendatang dalam arti pekerja pelabuhan yang kontrak di daerah tersebut, banyak kendaraan lalu lalang. Menurut Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Balikpapan, wilayah Kelurahan Baru Ulu merupakan salah satu wilayah yang paling rawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Daerah ini bahkan sempat disebut-sebut sebagai Kampung Narkoba karena dikaitkan dengan pengungkapan kasus narkoba



Foto: Lindawati (2022)

Gambar 2.4 Pemandangan Pemukiman di di Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat

di Balikpapan yang erat dengan kawasan tersebut. Ketika petugas mendatangi salah satu rumah untuk pendataan, sedang terjadi transaksi jual beli “ikan asin” (istilah yang digunakan petugas untuk obat-obatan terlarang dan narkoba) dengan penghuni di loteng rumah. PPL dan PML akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut, khawatir akan terlibat permasalahan serius.

C. Menelisik Awal Pemahaman Proses Bisnis Registrasi

Terdapat tiga jenis statistik yang perlu diketahui. Pertama, statistik dasar yang diselenggarakan oleh BPS. Kedua, statistik sektoral yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga/OPD untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Ketiga, statistik khusus yang diselenggarakan perorangan/masyarakat untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat. Terkait dengan satu data Indonesia (SDI) untuk data statistik yang berkualitas, salah satu implementasinya adalah penggunaan kode referensi klasifikasi baku lapangan usaha (KLBI) yang digunakan oleh OSS untuk perizinan usaha dan master file desa (MFD) yang digunakan dalam pengambilan sampel. Dengan adanya penyediaan data spasial dan database kerangka induk *willkerstat* BPS menjaga pembaruan data wilayah kerja agar ada homogenitas.

Dengan tersedianya data sosial ekonomi yang terintegrasi dan akurat akan memudahkan para pengambil kebijakan untuk menentukan langkah yang harus ditempuh, dari pusat sampai ke daerah. Hasil Regsosek diharapkan dapat menghasilkan data yang diperlukan tersebut sehingga penduduk miskin dapat terdeteksi dengan benar dan bantuan yang digulirkan pemerintah tepat sasaran. Selama ini pihak BPS daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sering kali didatangi oleh penduduk/masyarakat setempat terkait bantuan yang disalurkan. Banyak penduduk yang datang ke Kantor BPS menanyakan siapa saja yang terdaftar dalam program-program pemberian bantuan.

Banyak keluhan masyarakat bahwa yang mendapatkan bantuan adalah orang yang terbilang mampu, sementara menurut mereka yang benar-benar berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah justru tidak mendapatkan.

Keluhan masyarakat tersebut juga disampaikan kepada ketua RT setempat. Akan tetapi, para ketua RT tersebut tidak dapat berbuat banyak karena menurut mereka daftar nama tersebut berasal dari data pemerintah pusat. Tim menghubungi beberapa ketua RT karena banyaknya keluhan dari masyarakat seputar dana bantuan pemerintah, yang juga disampaikan kepada tim saat di lapangan (Regsosek). Informasi yang diperoleh adalah kemungkinan data yang masih dipakai hingga saat ini merupakan data lama. Warga yang tadinya tergolong berhak mendapat bantuan, seiring berjalannya waktu dapat menjadi lebih baik tingkat ekonominya. Akan tetapi, pada saat pemberian bantuan nama warga tersebut masih tercatat dan turut menerima bantuan. Intinya, data harus *update* setiap tahun. Oleh karena itu, hasil Regsosek tahun 2022 ini sangat diharapkan akan membantu seluruh pihak dalam hal pemutakhiran data, sesuai tujuan dari pendataan awal Regsosek adalah untuk menyediakan sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan.

1. Petugas Regsosek

Rekrutmen petugas dibuka mulai tanggal 5 September 2022 dengan menggunakan aplikasi SOBAT (unggah atau *download* via *playstore*) atau melalui mitra.bps.go.id untuk pendaftaran mandiri mitra. Jika pelamar mendaftar secara manual ke kantor BPS atau dengan cara lainnya maka admin BPS akan memasukkan data mitra tersebut ke manajemen mitra.bps.go.id agar pengelolaan datanya berada di satu tempat. Setelah dinyatakan lulus sebagai petugas (mitra), kemudian petugas dilatih secara *offline* selama beberapa hari. Selama pelatihan dijelaskan tentang konsep definisi yang digunakan dalam pendataan

Regsosek dan diajarkan hal apa saja yang harus dilakukan di lapangan sesuai tugas masing-masing.

Penanggung jawab kegiatan pelaksanaan lapangan Regsosek di kabupaten/kota adalah Kepala BPS kabupaten/kota, sedangkan penanggung jawab teknis adalah Tim Pelaksana Teknis, dan penanggung jawab administrasi adalah Tim Pelaksana Administrasi. Petugas lapangan terdiri dari Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka), Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML), dan Petugas Pendataan Lapangan (PPL). Koseka bertanggung jawab mengawasi seluruh Tim Pendataan Awal Regsosek di wilayah tugasnya. Koseka berperan penting dalam mengorganisasikan kegiatan pendataan di tingkat kecamatan.

Setiap Petugas Pendataan Lapangan (PPL) memiliki beban tugas mendata sekitar 250 KK dan setiap Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML) bertugas mengawasi dan memeriksa hasil pendataan yang dilakukan oleh 4 PPL. Koseka pada umumnya bertanggung jawab di satu kecamatan. Jika dalam satu kecamatan terdapat lebih dari 4 PML, maka dapat ditambahkan 1 orang Koseka. Dalam hal ini, di Kota Balikpapan, terdapat 1.104 orang petugas lapangan yang diturunkan ke rumah tangga.

2. Mekanisme Pendataan Lapangan

Secara garis besar kegiatan lapangan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: a) persiapan lapangan; b) verifikasi keberadaan keluarga; dan c) pendataan keluarga. Alur kegiatan lapangan yang dilakukan oleh PPL dimulai dari persiapan sampai dengan pendataan. Pengawasan yang dilakukan oleh Koseka berperan penting dalam dalam menjamin kegiatan pendataan di tingkat kecamatan dapat terlaksana sesuai dengan SOP. Mengumpulkan kembali semua hasil pendataan, memeriksa kelengkapan dokumen dan isinya, serta menyampaikan ke BPS kabupaten/kota.

3. Pengawasan dan Pemeriksaan oleh PML

PML harus berperan aktif dalam pengawasan PPL selama periode pelaksanaan lapangan pendataan awal Regsosek. Mendampingi dan mengevaluasi kinerja dari PPL saat pendataan merupakan bentuk pengawasan oleh PML. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa PPL sudah melakukan tugasnya sesuai dengan SOP sehingga hasil pendataan yang didapatkan menjadi optimal. Laporan pengawasan dibuat secara berkala dan diserahkan kepada BPS kabupaten/kota.

D. Antara Nilai Positif dan Tantangan dalam Mendata

Selama sepekan, tim berada di Kota Balikpapan memantau pelaksanaan pendataan registrasi sosial ekonomi (Regsosek), banyak hal yang dapat dipetik dari masyarakat yang ditemui. Setiap kecamatan memiliki suasana dan fenomena yang berbeda. Di pemukiman kumuh, kehidupan masyarakatnya tampak memprihatinkan. Namun, masyarakat merasa terbiasa dan mensyukuri kehidupannya.

Pengalaman berbeda dialami petugas pendata saat mengunjungi pemukiman selanjutnya. Rumah warga terlihat dalam kondisi layak, permanen dari tembok dan kehidupan warga menunjukkan situasi yang lebih baik. Warga pada pemukiman sebelumnya mudah untuk ditemui dan dengan ramah menyambut kedatangan petugas. Akan tetapi, saat berkunjung ke pemukiman yang lebih bagus, petugas perlu bersabar untuk dibukakan pintu, bahkan sering tidak dapat menemui warga (pada jam kerja). Cara penyambutan penghuni rumah juga sedikit berbeda, yakni terlihat lebih berhati-hati dengan petugas yang datang. Pada akhirnya, petugas tetap diterima untuk wawancara.

Pengalaman menarik lainnya ialah adanya warga yang tidak bersedia menerima petugas Regsosek. Tim petugas mendatangi rumah tersebut, berupaya membantu petugas lapangan dan berharap dengan mendengar penjelasan dari petugas, warga tersebut bersedia diwawancarai. Setibanya tim dan petugas di rumah tersebut, mengetuk pintu dan mengucapkan salam, terdengar teriakan dari dalam rumah “saya

tidak mau didata”. Petugas menjelaskan maksud dan tujuan pendataan, tetapi penghuni rumah tetap dengan teriakannya “saya tidak bersedia, mau dipanggil polisi pun saya tidak bersedia”. Petugas Regsosek tidak putus asa dan pantang menyerah, kemudian menelpon kader yang ada di RT tersebut. Kader RT tersebut datang dan mengetuk pintu sambil memperkenalkan diri dan menjelaskan kedatangannya, tetapi tetap saja, jawaban dari dalam rumah “saya tidak mau didata”. Setelah dilihat daftar nama warga yang ada di RT tersebut, ternyata pemilik rumah adalah perempuan dan bukan laki-laki. Menurut ibu kader, kemungkinan bapak yang berteriak dari dalam rumah hanyalah orang yang menumpang tinggal di sana.

Berdasarkan hasil diskusi dengan PPL mengenai pengalaman pendataan Regsosek, pada umumnya tidak ada kesulitan yang berarti. Kendala yang sering ditemui adalah responden tidak ada di rumah sehingga petugas harus berkunjung beberapa kali atau melakukan pendataan di sore/malam hari (bagi pedagang di pasar). Kemudian, kondisi geografis yang sulit, yaitu rumah penduduk yang berada di ketinggian dengan kondisi jalan tanah liat. Apabila hujan turun maka akan sulit untuk mengakses daerah tersebut. Begitu pula dengan beberapa ketua RT/sesepuh yang ditemui, umumnya ketua RT tidak keberatan dan menyambut baik pendataan Regsosek. Ketua RT dan tokoh masyarakat berharap agar pada masa mendatang, data *terupdate* dengan baik sehingga bantuan yang disalurkan tidak lagi salah sasaran.

Pengalaman berbeda diceritakan pendata yang bertugas di kawasan elit. Kawasan yang terletak di bagian selatan dan berdekatan dengan Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, dikenal sebagai kawasan dengan perumahan mewah/elit dan apartemen. Petugas mengakui sangat sulit untuk masuk sampai ke kediaman penduduk. Pendampingan khusus dan surat resmi diperlukan dari pejabat setempat untuk bisa masuk. Hal yang menjadi perhatian adalah tingkat ekonomi yang mapan dan pendidikan yang tinggi tidak menjamin penerimaan yang baik terhadap program Regsosek. Upaya khusus dan intensif diperlukan agar petugas pendata dapat diterima

dengan baik. Alasan dibalik bertingkatnya pengamanan diduga karena warga setempat cenderung lebih berhati-hati dalam memberikan data sehingga perlu diyakinkan dengan cara yang berbeda bahwa sensus yang dilakukan adalah aman dan resmi. Di kawasan ini, petugas Regsosek harus didampingi *security* pada saat pendataan. Petugas pendataan pun hanya dapat menemui sedikit warga yang berada di rumah dan dapat ditemui. Untuk kawasan apartemen, BPS melakukan koordinasi dengan pihak pengelola, pihak pengelola kemudian menyampaikan kepada penghuni apartemen. Pendataan ada yang dibantu oleh pihak pengelola (dengan menyampaikan form), ada yang melalui *voice call* atau *video call*, dan hanya sedikit yang dapat ditemui secara langsung oleh petugas.

Evaluasi juga dilakukan secara berkala, setiap pagi hari untuk memantau perkembangan capaian pendataan. Tim akan memberikan perhatian khusus untuk kawasan yang capaiannya rendah atau di bawah rata-rata. Salah satu contoh adalah di Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur. Berdasarkan data di sistem per



Foto: Lindawati (2022)

Gambar 2.5 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Regsosek di Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur

2 November 2022, dari sekitar 7.705 KK pada data *prelist*, baru sekitar 2.700 KK atau 35% yang sudah terdata. Dalam mencari tahu penyebab hal ini, Kepala BPS Kota Balikpapan berdiskusi langsung dengan para PPL dan PML di salah satu kediaman warga setempat.

Pertemuan Kepala BPS Kota Balikpapan dengan PML dan PPL esensinya merupakan forum evaluasi. Namun, suasana cair dan akrab yang terbangun antara pimpinan BPS dengan para petugas lapangan menjadikan forum ini mirip seperti sesi curhat, terkadang PML dan PPL tidak sabar berbicara. Masing-masing PML dan PPL menyampaikan kendala yang dihadapi, mulai dari ketidaksesuaian data *prelist*, sinyal sulit di area pegunungan, hingga yang kehabisan kuota internet. Untuk kendala terakhir, kepala BPS langsung mengirimkan pulsa tambahan kepada yang bersangkutan dan diiringi keriuhan petugas yang lain.

Beberapa kendala yang disampaikan ialah ketidaksesuaian data *prelist*, yakni KK tidak ditemukan, sebagian merupakan penyewa kurang dari 3 bulan, ada yang telah berpindah, bangunan tidak lagi ditempati, terdapat pemekaran dari RT yang lama. Terkait hal ini, PPL melaporkan perbedaan data *prelist* dan kondisi riil *eksisting* kepada PML/Koseka. Kendala selanjutnya terkait pendataan di kawasan asrama tentara. Informasi dari ketua RT terdapat 26 KK yang tinggal di sana. Namun, setelah dilakukan pendataan ternyata tidak mencapai jumlah tersebut karena tidak ditempati secara permanen dan hanya sebagai transit. Suami dan istri tinggal di lokasi yang berbeda. Solusinya, jika hanya suaminya saja yang menetap di asrama maka pencacahan dilakukan terhadap suaminya saja, pencacahan terhadap istri dan anak-anak dilakukan sesuai dengan lokasi mereka tinggal. PPL menyesuaikan isian dengan kategori/kode yang terdapat pada form pencacahan. Kemudian, angka penderita Covid-19 di area ini sedang naik sehingga ada warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Selanjutnya pendataan dilakukan via telepon atau *video call*, dan tidak dapat dilakukan penandatanganan form. Petugas menambahkan catatan dalam form bahwa warga tersebut sedang menjalani isoman.

Permasalahan lain terkait progres capaian Regsosek di Kota Balikpapan adalah banyaknya PPL yang takut melakukan *upload*, padahal telah selesai melakukan pendataan dan *tagging* lokasi. Ini yang membuat progres capaian pendataan pada aplikasi terlihat rendah. Petugas khawatir masih terdapat data yang keliru sehingga takut meng*upload* data. Kendala lain yang dihadapi petugas, yaitu sulitnya melakukan *tagging* lokasi karena akurasi yang dipersyaratkan sulit tercapai, serta kondisi sinyal yang kurang baik di lokasi pencacahan khususnya di area pegunungan. Petugas mengatasi hal ini dengan menyesuaikan tingkat akurasinya menjadi 50 m dan melakukan *upload* data sesegera mungkin setelah kondisi sinyal lebih baik.

E. Dukungan Kelembagaan Sosial dalam Pendataan

Suasana hangat terasa saat bertemu dengan petugas lapangan di Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat. Di lokasi, tim bertemu dengan beberapa petugas lapangan, yakni Bpk. MA (PML), Bpk. US (PPL), Ibu N (PPL), dan Pak F (PPL). Tawa riang muncul saat para petugas memanggil rekannya dengan julukan masing-masing, seperti “big boss” untuk PPL yang bertubuh tinggi besar dan “boscil” untuk PPL yang bertubuh mungil.

Kawasan ini berada dekat dengan pelabuhan di mana lokasinya yang cukup menantang, baik dari kontur wilayahnya di area perbukitan yang dekat dengan pesisir pantai, jalan berkelok, serta memiliki potensi kerawanan sosial. Oleh karenanya, petugas lapangan nyaris tidak melakukan pendataan sendiri-sendiri, namun secara berkelompok dengan didampingi oleh ketua RT setempat. Tim pun sempat diingatkan untuk berhati-hati dan tidak membiarkan kondisi tas terbuka saat sedang berkeliling di sana. “Mba, itu tasnya jangan sampai terbuka, nanti dilempari, diselipin ‘ikan asin’ bisa repot semua, mba”, ucap ketua RT. Unikny PPL dan PML yang bertugas merupakan ketua RT sehingga dapat saling mendukung satu sama lain dan memudahkan koordinasi dengan ketua RT di wilayah pendataannya.



Foto: Lindawati (2022)

Gambar 2.6 Petugas Lapangan, Babinsar, dan Sekretaris Lurah Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat bersama dengan Tim BPS-BRIN

Diskusi berlanjut dengan Bapak NP (52 tahun) yang merupakan ketua RT setempat. Bapak NP berasal dari Pare-Pare, datang ke Balikpapan pada tahun 1991 untuk ikut dengan saudaranya bekerja di pelabuhan. Istri beliau berasal dari Balikpapan dan kesehariannya berdagang sayur di pasar. Menurut beliau, pendataan seperti Regsosek sangat dibutuhkan karena terlalu banyak sanggahan terhadap data yang ada saat ini. Misalnya, ketika ada pembagian bantuan sosial di siang hari, malam harinya beliau sudah mendapat banyak protes dan keluhan dari warga karena penerima bantuan tersebut dianggap tidak tepat sasaran.

Bapak NP pertama kali mendengar mengenai Regsosek dari petugas lapangan. Area wilayah RT Bapak NP tidak terlihat adanya baliho, poster, ataupun spanduk terkait Regsosek. Media sosialisasi tampaknya cukup minim di daerah ini. Respon masyarakat terhadap pendataan cukup beragam ada yang menerima dengan baik, namun ada pula yang memandang negatif dan mempertanyakan fungsi dari pendataan yang dilakukan. Mayoritas penduduk merupakan buruh lepas dan sebagian bekerja di pelabuhan. Tingkat hilir mudik

pendatang di wilayah ini cukup tinggi dengan permasalahan sosial yang dihadapi adalah peredaran obat-obatan terlarang dan narkoba yang cukup tinggi. Oleh karena itu, petugas lapangan didampingi oleh ketua RT agar warga tidak resisten dan petugas lebih aman dalam menjalankan tugasnya. Pendataan umumnya dilakukan setelah pukul 10 pagi atau bahkan malam hari, menyesuaikan dengan waktu pemilik rumah. Warga juga ada yang meminta pendataan setelah pukul 10 malam sehingga di wilayah ini petugas kadang melakukan pendataan sampai pukul 12 malam.

Peran penting ketua RT juga tampak di lokasi lainnya, yakni di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara. Bapak MS datang dari Jember ke Balikpapan pada tahun 1992. Istri beliau juga berasal dari Jember. Bapak MS memiliki dua orang putri, putri pertama menamatkan kuliah dari Universitas Balikpapan, sedangkan anak kedua di Universitas Mulawarman, Samarinda. Awalnya beliau ke Balikpapan ikut dengan kakak mencoba-coba berkebun, lalu berjualan bakso. Saat ini beliau bekerja serabutan dan bertani karet.

Warga di Kelurahan Karang Joang umumnya adalah petani singkong, laos, sereh, sayuran, atau karet. Ada petani yang memiliki lahan sendiri dan ada pula yang menggarap tanah milik negara dengan status lahan adalah hak garap. Salah satu contohnya adalah lahan yang digarap oleh Bapak MS. Ketika ditanyakan mengapa tidak membeli lahan sendiri, sambil tertawa beliau menyampaikan bahwa uangnya habis untuk biaya sekolah putri-putrinya. Beliau menyampaikan, "Itu dendam saya dahulu mau teruskan ke SMA tapi bapak tidak mampu, sudah ku balaskan ke anak. Dua-duanya sudah tamat kuliah. Termasuk merantau ke Balikpapan ini. Awal aku pergi-pergi dari rumah, lama-lama minggat karena malu sama teman-teman nggak lanjut SMA. Aku pertama kali ke Balikpapan lulus SMP, usia 13 tahun."

Kelompok tani yang ada di Karang Joang adalah kelompok tani umum. Seluruh petani harus bergabung dan jika tidak maka tidak akan mendapatkan bantuan bibit atau subsidi pupuk, meskipun pupuk subsidi tersebut belum tentu tersedia di toko karena stoknya kosong. Dahulu ada bantuan bibit pisang dan karet. Pohon karet yang

ditanam Bapak MS juga merupakan bantuan dari pemerintah sekitar 12 tahun lalu. Bapak MS diberikan bibit, tiga karung pupuk, dan biaya pembukaan lahan sebesar satu juta rupiah.

Sebelum didatangi oleh petugas, Bapak MS tidak mengetahui apa itu Regosek, serta nyaris tidak pernah melihat di media sosial maupun televisi. Menurut Bapak MS, Regosek bermanfaat untuk kesesuaian data bantuan sosial dan data yang sudah ada diperbarui. Data terkait warga yang seharusnya sudah tidak dapat bantuan misalnya, warga tersebut masih menerima bantuan. Semoga pada masa mendatang, pendataan akan lebih tepat sasaran.

Penampilannya warga disini memang begini, mba. Rumah-rumah tidak dibersihkan, rumah keadaan seperti itu, dinding dari kayu, tetapi mobil ada dua, usahanya banyak. Tidak dibersihkan bukan karena repot mba, memang warga disini seperti itu. Kalau RT tidak diberi tahu dan petugas hanya melihat kondisi rumah dan penampilannya saja maka data nggak sesuai, yang lebih perlu nanti malah nggak dapat. Jadi ribut nanti orang-orang, memang perlu pendataan ulang ini. Kalau yang *diupdate* di kelurahan dari puskesmas, tapi kadang data *updatenya* malah tidak masuk. Mudah-mudahan ke depannya bantuan lebih tepat sasaran, misalnya per tahun ada pembaruan data. Contohnya, kemarin ada bantuan dari lembaga zakat, ada 30 paket, minta tolong saya yang carikan, jadi dipilihkan dari RT mana yang berhak menerima. Pendataan juga begitu, agar lebih sesuai karena RT yang mengetahui kondisi warga, mana yang kategori miskin atau tidak miskin saya tunjukkan. Kalau misalnya petugasnya sudah mendata lebih dahulu, nanti RT yang akan mengkonfirmasi misalnya warga tersebut ternyata tidak miskin hanya tampak miskin. Mudah-mudahan masyarakat yang ditanyai benar-benar menjawab dengan kondisi sesungguhnya dan tidak berbohong karena menutupi aset yang dimiliki. (Wawancara MS, 1 November 2022).



Foto: Lindawati (2022)

Gambar 2.7 Pemandangan Pemukiman di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara

Hal senada juga disampaikan oleh petugas lapangan, warga cenderung mengurangi nilai aset yang dimiliki atau bahkan ada yang menyatakan tidak memiliki simpanan emas atau lahan, padahal kondisinya riilnya sebaliknya. Jika bukan dari ketua RT yang memberitahu maka petugas akan terkecoh. Masyarakat pun perlu dihimbau menjawab pertanyaan yang disampaikan petugas sesuai dengan kondisi sebenarnya. Apabila warga berkecukupan, memiliki lahan berhektar-hektar, tetapi masih mendapat bantuan akan sangat tidak adil bagi warga yang benar-benar membutuhkan.

PPL dan PML di kelurahan ini bersyukur atas ketua RT yang sangat kooperatif seperti Bapak MS. Menurut warga, ada pula ketua RT yang masa bodoh, artinya ketika disodorkan *prelist* untuk dikonfirmasi mana yang miskin dan tidak miskin, malah diserahkan ke petugas dan mengatakan, “Saya ndak tahu mba, mba datang aja, lihat aja sendiri.” Ada anggapan bahwa petugas kan mendapatkan gaji, untuk apa ketua RT bantu-bantu petugas. Jika sudah seperti ini, ketika ada kekeliruan, ketua RT menyampaikan ke warga bahwa

kekeliruan itu merupakan ulah petugas dan mencari aman padahal ia tahu kondisi yang sebenarnya.

F. *Life Story* Pendata

1. MA: PML Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat

Bapak MA (usia 46 tahun), sehari-hari merupakan petugas kontrak di Dinas Lingkungan Hidup untuk pengawasan dan pengambilan sampah di atas air. Di Kelurahan Baru Ulu terdapat sembilan RT yang berada di tepian pantai dan memiliki area pemukiman di atas air. Jika air laut pasang, sampah juga turut terbawa ke pemukiman warga menyisakan tumpukan sampah pada saat air surut. Tugas Bapak MA adalah jika air laut pasang dan sampah terbawa air maka tim beliau yang mengambil sampah-sampah itu.

“Saya mengambil sampah di RT 30, 41, 31, 49, 48, 29, dan 28. Setiap hari keliling, jam 8 sampai jam 10 mengambil sampah, setelah jam 10 lanjut lagi pendataan. Tim pengambil sampah ada 5 orang. Kadang-kadang air pasang bisa masuk ke rumah, biasanya di akhir tahun. Kondisi air pasang dan hujan deras, air masuk ke rumah warga. Misalnya di rumah Pak F (salah satu PPL), air sampai 40 cm dan bisa berenang di dalam rumah. Semoga bulan Desember tidak bertambah berat.” (Wawancara MA, 2 November 2022)

Sebelum menjadi PML, Bapak MA sudah menjadi mitra BPS pada tahun 2016 dan pada tahun 2020 untuk kegiatan sensus penduduk (SP2020). Beliau pertama kali mengetahui Regsosek dari medsos. Selain itu, beliau pernah menjadi mitra sehingga beliau dihubungi dan diinformasikan oleh pihak BPS untuk kegiatan ini. “Mungkin karena pernah mengikuti kegiatan di BPS sebelumnya sehingga saya dihubungi. Di satu sisi kami juga sudah tahu medan dan kami juga ketua RT,” ungkap beliau. Beliau melanjutkan, “Pendataan kan memang butuh orang yang dikenal, Bu. Kan banyak rumor-rumor di

sosial media, jangan memberikan data sembarangan pada orang yang tidak dikenal.” Menurut Bapak MA, pemukiman yang paling ‘berat’ kondisinya ada di lingkungan RT 38 dan 40. Ada sekitar 10 orang yang di-*tag* dengan kategori miskin di wilayah tersebut.

Banyak suka duka saat menjadi petugas lapangan, diantaranya dianggap sebagai peminta sumbangan hingga dikejar-kejar hewan peliharaan. Namun, menurut beliau, pengalaman ini adalah tantangan untuk belajar sabar dan apapun diterima. Ada pula warga yang mempersilakan petugas masuk dan diminta menunggu sebentar untuk mengambil KK. Akan tetapi, setelah menunggu lama sampai lebih dari setengah jam, orang itu tidak juga muncul. Bapak MA tidak memahami apakah memang karakter respondennya atau faktor kesalahan dari petugas, misalnya saat petugas datang, responden sedang beristirahat. Dalam hal ini, petugaslah yang harus memaklumi responden, responden mungkin masih lelah karena baru selesai bekerja atau pekerjaannya bermasalah, atau kondisinya sedang kurang baik. Rekan-rekan PPL yang pasti akan mencoba lagi mengunjungi responden tersebut di lain hari untuk mendapatkan data. PPL pun bersyukur bahwa saat melakukan pendataan, tidak ada medan yang tidak dapat dilalui dan tidak ada masyarakat yang betul-betul menolak pendataan. Kendala yang dihadapi bukan menjadi alasan untuk tidak mendata.

“Kami kan ada lima orang termasuk saya, keluhan-keluhan dari petugas dan warga saya tampung semua. Kalo disini kendala permasalahannya adalah peredaran ‘ikan asin’. Kita harus sabar aja disitu. Pertama kan kami melihat kartu keluarga dan wajar saja masyarakat takut kartu keluarga diambil. Karena setiap harinya banyak pula penyidik yang memantau peredaran ‘ikan asin’. Kami jelaskan, yang kami lakukan tidak ada kaitannya dengan hal lain macam-macam, yang kami tanyakan adalah masalah sosial ekonomi bapak/ibu.” (Wawancara MA, 2 November 2022)

Petugas mengungkapkan pengalaman paling berkesan selama menjadi mitra BPS ialah belajar membaca dan mempelajari karakter

orang. Terkadang, hingga malam hari, beliau masih di jalan karena sebagian responden pulang kerja sekitar waktu magrib. Beliau biasanya melakukan pendataan sampai pukul 9 atau 10 malam, bahkan pernah menjelang dini hari. Menurutnya, pendataan tidaklah sulit, hanya petugas saja yang harus pandai-pandai untuk memahami responden. Adapula warga yang antusias dan menunggu petugas datang. Menurutnya, rekan-rekan PPL juga menikmati peran ini. Apabila tidak dapat naik gunung karena lelah maka ada rekan lain yang membantu. Intinya kekompakan dan saling mendukung satu sama lain dalam melaksanakan tugas.

2. NZ: PPL, Kelurahan Muara Rapak, Balikpapan Utara

NZ, lahir di Balikpapan tahun 1977. Alm. ayah beliau merupakan kelahiran Surabaya yang merantau pada usia 20 tahun ke Balikpapan, saat itu kapal yang ada masih berupa kapal kayu. “Disitu sampai, disitulah kaki berpijak” menjadi prinsip yang dipegang oleh alm. ayah beliau. Alm. ayah beliau kemudian melamar di sebuah bengkel. Pemilik bengkel yang saat itu tidak memiliki anak, akhirnya mengangkat alm. ayah NZ sebagai anak angkat mereka, hingga akhirnya mampu membuka bengkel sendiri, Alm. ayah beliau telah menjadi ketua RT di Kelurahan Muara Rapak (semula bernama Gunung Samarinda) selama kurang lebih 30 tahun (saat ini sudah tidak ada RW di Balikpapan, sejak sekitar 1990-an hanya RT saja).

Suami dari Ibu NZ bekerja di Kaltim Pos, lahir di Indramayu saat mertua bertugas di sana namun besar di Kalimantan. Semula suami beliau bekerja di bagian desain grafis. Namun, karena kondisi pandemi Covid-19 ada tiga opsi yang dihadapi, yakni dirumahkan dengan gaji sebesar satu juta per bulan, diberhentikan dengan pesangon, atau tetap bekerja namun dipindahkan ke posisi yang lebih rendah ke bagian umum. Suami Ibu NZ saat itu mengambil opsi ketiga karena anak masih sekolah di kelas 1 SMK, “Yang penting tiap bulan masih ada *income* yang diperoleh,” ujarnya.

Ibu NZ juga bekerja sebagai perias. Ia pernah mengikuti beberapa sekolah perias untuk pengantin Bugis, Banjar, Yogya, dan muslim modern. Pendidikan terakhir beliau adalah SMK Akuntansi. Sejak lulus SMK, Ibu NZ telah aktif di kegiatan masyarakat sebagai kader posyandu. Awalnya, beliau hanya ikut saja sebagai kader posyandu (menimbang bayi/balita). Namun, kader (utama) berpindah rumah sehingga Ibu NZ yang akhirnya mengelola posyandu. Setiap pergantian ketua RT, Ibu NZ tetap menjadi kader Posyandu karena tidak ada warga lain yang bersedia mengurus hal-hal seperti itu. Ibu NZ kemudian menjadi ketua RT sejak tahun 2019. Ketua RT yang sebelumnya mengundurkan diri dan akhirnya diadakan pemilihan. Ibu NZ didorong oleh warga untuk mencalonkan diri hingga terpilih sebagai ketua RT.

Hingga saat menjadi ketua RT, Ibu NZ masih melakukan penimbangan bayi/balita. Sebelumnya, penimbangan bayi/balita sempat dilakukan di kediaman RT terdahulu. Namun, saat ini penimbangan bayi/balita dilakukan dari rumah ke rumah tiap satu bulan sekali. Pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan jentik nyamuk dengan kader Jumantik, sekaligus memeriksa kondisi rumah warga apakah sehat atau tidak. Warga sudah hafal dengan Ibu NZ dan di wilayah penugasan regsosek, Ibu NZ sudah mengenal 49 pemilik rumah yang ada di wilayah RT tersebut.

“Saya ikut seperti ini mencari ilmu, merias sesekali saja saat ada permintaan. Dahulu ada usaha sewa tenda kursi, namun karena saya tidak mampu menjalani sendiri akhirnya dijual. Saya ikut mitra BPS baru saat Regsosek ini. Ini pengalaman pertama. Saya diberi tahu oleh salah satu mitra BPS, sekaligus untuk mencari ilmu tentang BPS dan apa yang dikerjakan BPS. Awal ikut proses, saat mendaftar diberikan lembaran isian melamar jadi PPL, saat diwawancara membawa berkas, kemudian diterima atau tidaknya diumumkan lewat *online*. Setelah lulus dan dinyatakan sebagai calon PPL, barulah dilakukan pelatihan.” (Wawancara NZ, 2 November 2022).

Menurutnya, kendala dalam pendataan sering kali muncul saat akan memfoto dinding rumah, lantai, atap, dan kamar mandi rumah warga yang termasuk dalam kategori miskin atau sangat miskin. Warga ada yang berkeberatan dan menyatakan kalau seperti itu caranya biar saja tidak perlu dimasukkan dalam kategori tersebut, biarpun susah makan dan tidak dapat bantuan tidak apa-apa. Ibu NZ kemudian menyampaikan kepada warga tersebut petugas tidak mengetahui apakah warga akan mendapatkan bantuan atau tidak, tetapi tuntutan pendataan memang perlu mengambil gambar/foto kondisi rumah.

Saat pelatihan telah disampaikan, petugas hanya perlu mengamati kondisi rumah apakah layak atau tidak. Namun, dalam perkembangannya, petugas diminta untuk mengambil gambar kondisi rumah warga. Pendataan dimulai dengan menemui RT setempat untuk verifikasi data, memastikan keberadaan dengan *checklist* data menggunakan pensil. Selanjutnya, memeriksa kategori kesejahteraan warga yang juga ditandai oleh ketua RT. Dalam hal ini, penentuan tingkat kesejahteraan warga apakah termasuk dalam kategori sangat miskin, miskin, atau tidak miskin juga merupakan hak prerogatif ketua RT. Namun, apabila ada warga yang tidak pernah melapor kepada ketua RT mengenai situasinya maka petugas yang akan membantu menentukan kategori miskin atau tidak miskin untuk warga tersebut.

Terkadang terdapat ketidaksesuaian hasil temuan di lapangan dengan kategori yang disampaikan oleh ketua RT setempat. Menurut petugas, penentuan kategori miskin dan sangat miskin juga dipengaruhi oleh tekanan sosial yang diberikan kepada ketua RT setempat. Ketua RT mendapatkan tekanan dari warga tertentu, jika ada pendataan maka warga tertentu harus dimasukkan sebagai kategori penerima bantuan. Selain itu menurutnya, kondisi ekonomi di suatu wilayah juga mempengaruhi penentuan kriteria miskin dan tidak miskin. Wilayah penugasan Ibu NZ rata-rata memiliki kondisi ekonomi cukup baik sehingga kondisi warga yang masuk dalam kategori miskin mungkin akan berbeda dengan kondisi warga yang bertempat tinggal di area lain karena penentuan berdasarkan persepsi

dari ketua lingkungan setempat. Namun demikian, akan ada verifikasi tahap berikutnya, yakni verifikasi kesesuaian antara temuan petugas saat sensus dengan pengkategorian yang disampaikan oleh ketua RT setempat.

3. SM: PPL, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara

Bapak SM (PPL), berasal dari Pacitan, Jawa Timur. Pria kelahiran tahun 1969 ini datang merantau ke Balikpapan sejak tahun 1994. Bapak SM adalah anak keempat dari tujuh bersaudara. Keputusannya merantau ke Balikpapan untuk mengubah kondisi keluarga agar adik-adiknya dapat melanjutkan sekolah. Bapak SM merupakan tamatan SMP. Saat ini, beliau telah memiliki dua orang putri. Putri pertama melanjutkan pendidikan di Institut Teknologi Kalimantan dan putri kedua duduk di kelas 3 SMP. Prinsip yang beliau pegang adalah meskipun kondisi beliau sulit, anak-anaknya harus lebih baik dari beliau. Pertama kali tiba di Balikpapan, Bapak SM bekerja sebagai tukang kayu. Bapak SM tidak memiliki lahan kebun dan hanya sebidang tanah untuk rumah yang ditempati. Bapak SM khawatir untuk membeli lahan kebun karena kondisi lahan disana terkadang kepemilikannya tumpang tindih. Saat ini, Bapak SM bekerja serabutan, sebagai tukang kayu, sebagai kuli bangunan, tukang urut, dan mencoba untuk memelihara beberapa ekor kambing sebagai simpanan.

Bapak SM mendapat tugas mendata di kawasan perkebunan dan daerah pembuatan batu bata. Kendala yang ditemui ketika melakukan pencacahan ialah: a) jarak antar rumah yang berjauhan, b) kondisi jalan yang umumnya tanah liat dan sulit dilalui dalam kondisi hujan karena licin, c) kondisi sinyal yang buruk di area perkebunan, dan d) penyesuaian dengan waktu para pekerja pembuat batu bata. Beberapa responden yang awalnya menolak didata adalah karena KTP ataupun KK responden masih terdaftar sebagai penduduk di wilayah Jawa, bukan di Balikpapan. Kemudian, Bapak SM menjelaskan bahwa pendataan ini dilakukan serentak di semua wilayah selama satu bulan.

Jika saat pendataan alamat domisili di Balikpapan maka pendataan dilakukan di Balikpapan. Jika ingin didata di kampung halaman maka akan terlewat untuk pendataan karena batas waktu yang singkat, dan jika tetap tidak mau jangan sampai menyalahkan petugas jika tidak terdata. Selain itu, menurutnya responden cenderung menutupi aset yang dimiliki, misalnya mobil terparkir di samping rumah, tetapi tidak diakui sebagai miliknya. Bapak SM berharap program Regsosek ini nantinya dapat membantu agar penerima bantuan sosial dari pemerintah lebih tepat sasaran.

G. *Life Story* Sebuah Keluarga

Saat mendengar mengenai pemukiman di dekat tepian pantai, akan terbayang suasana segar dan nyaman dengan angin sepoi-sepoi dan pemandangan laut yang indah membentang. Saat turun dari kendaraan dan mulai memasuki area pemukiman di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, suasana terlihat cukup nyaman. Namun, ketika masuk lebih dalam ke area pemukiman, terlihat hal yang sangat berbeda. Pemandangan yang terlihat di kolong rumah penduduk penuh dengan sampah dan mungkin menurut yang melihat (sebagai pendatang) akan menggumam “betapa kotor dan tidak sehatnya rumah hunian tersebut”. WC tempat buang air besar tidak tersedia. Kesan yang tergambar ialah kondisi sanitasi yang tidak layak. Kesan tersebut merupakan pandangan para pendatang. Namun, bagi penghuni setempat, kondisi demikian merupakan bagian dari keseharian dan dianggap biasa saja.

Rumah warga tersebut ditempati oleh dua keluarga, yaitu Ibu AD dengan putra bungsunya dan putri Ibu AD dengan ketiga anaknya yang masih kecil. Ibu AD dan putrinya telah bercerai dengan pasangannya. Penghuni rumah sejumlah enam orang tinggal di rumah yang disebutkan adalah milik kerabat keluarga. Sehari-hari Ibu AD bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan penghasilan Rp700.000,00 per bulan, sedangkan putrinya bekerja sebagai pencuci piring di restoran. Ibu AD menuturkan bahwa putrinya ditinggalkan



Foto: Lindawati, 2022

Gambar 2.8 Pemandangan Pemukiman di Kelurahan Damai

oleh suaminya dan harus membiayai ketiga anaknya yang masih kecil. Oleh karena itu, keduanya harus bekerja. Ibu AD membantu beres-beres di rumah tetangganya pada sore hari, yakni setelah putrinya tiba di rumah karena ada bayi dan anak kecil yang harus dijaga. Ibu AD bersyukur dengan adanya pendataan yang dilakukan. Ibu AD dan putrinya juga merasa tertolong dengan bantuan yang selama ini diberikan oleh pemerintah, seperti PKH ataupun bantuan langsung tunai.

Perjalanan tim berlanjut dan bertemu dengan ibu-ibu yang sedang duduk di pojok rumahnya bersama dengan beberapa anak kecil. Tim menemui salah satu responden, yaitu Ibu AS. Ibu AS tinggal di rumah panggung yang disewa Rp300.000,00 per bulan. Ibu AS mempunyai dua orang anak, putri dan putra. Putri pertamanya sudah menikah dan mempunyai dua orang anak, namun ditinggal cerai hidup oleh suaminya. Ibu AS tinggal di samping rumah ibunya, sedangkan putra keduanya disabilitas rungu dan bekerja sebagai penjaga toilet di pasar (Ramayana). Ibu AS tidak memiliki pekerjaan, untuk membayar sewa rumah dan kebutuhan sehari-harinya mengandalkan putranya.

Rumah Ibu AS tidak diisi oleh satupun perabot. Hanya ada kompor minyak tanah yang digunakan untuk memasak, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air dengan mengambil dari pipa komunal



Foto: Lindawati (2022)

Gambar 2.9 Pemandangan Kediaman Ibu AS

yang terdapat beberapa puluh meter dari lokasi tempat tinggalnya. Ibu AS bercerita, jika beliau kehabisan minyak tanah maka beliau akan berjalan kaki ke pasar untuk menemui putranya dan meminta uang untuk beli minyak tanah. Tim cukup tercengang mendengar bahwa minyak tanah masih dijual untuk keperluan rumah tangga dan dengan harga yang cukup tinggi, yaitu Rp15.000,00–Rp 20.000,00 per liter.

Kondisi Ibu AS tidak menyebabkan beliau putus asa dan tetap semangat menjalani hidup. Selama ini, Ibu AS belum pernah mendapatkan bantuan dalam bentuk apapun dari pemerintah. Ibu AS menerangkan bahwa beliau sudah pernah menjadi responden dalam pendataan. Beliau tidak keberatan dengan kehadiran petugas Regsosek kali ini dan menjawab pertanyaan dengan sebenarnya. Ibu AS mengungkapkan harapannya agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran.

Responden berikutnya adalah Ibu HS (usia 60 tahun) di Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat. Suami Ibu HS bekerja

sebagai buruh pelabuhan. Ibu HS memiliki tujuh orang anak dan tiga diantaranya menjadi warga binaan karena terjerat penggunaan dan peredaran narkotika. Sejak beberapa tahun terakhir, Ibu HS mengalami stroke dan saat ini tinggal bersama anaknya yang bungsu. Kondisi stroke menyebabkan Ibu HS tidak dapat berbicara dengan jelas, terkadang Ibu RT setempat yang menerjemahkan maksud perkataan Ibu HS ke petugas. Menurut Ibu RT, dahulu perawakan Ibu HS ini bersih. Ibu HS tidak dapat merawat diri semenjak terkena stroke. Kondisi ini pula yang membuat suami Ibu HS memilih untuk menyewa rumah dekat pelabuhan, “Karena mungkin kondisi Ibu HS sakit dan dia capek pulang kerja dari pelabuhan, jadi memilih kontrak rumah di bawah sana, dekat pelabuhan,” ujar Ibu RT. Rumah Ibu AS memang tidak dilengkapi perabotan dan kompor karena beliau tidak dapat beraktivitas dan khawatir akan membahayakan. Kebutuhan makan dan minum disediakan oleh anak dan suami beliau. Kondisi beliau yang memprihatinkan membuat ketua RT setempat secara



Foto: Lindawati, (2022)

Gambar 2.10 Pemandangan Kediaman Ibu HS

rutin mengunjungi dan mengecek kondisi beliau sambil membawakan makanan.

Keluarga lain yang ditemui di kelurahan ini adalah Ibu IB (usia 60 tahun) berasal dari Pare-Pare. Suami Ibu IB telah wafat dan saat ini Ibu IB tinggal dengan anak-anaknya. Ketika ditanyakan tentang Regsosek, Ibu IB tidak memahami manfaatnya. Beliau juga tidak mengetahui apakah selama ini bantuan sosial yang diberikan ke warga tepat sasaran atau tidak karena beliau nyaris tidak dapat keluar rumah karena sakit dan sulit untuk berjalan. Ibu IB sebelumnya pernah menjadi responden saat masih tinggal di Pare-Pare.

Ibu IB tidak keberatan untuk didata dalam Regsosek selama petugas pendata didampingi ketua RT setempat, “Yang penting ada Bu RT saya percaya. Walaupun kata anak saya jangan sembarangan kasih data atau tanda tangan apa, tetapi kalau yang datang ditemani Bu RT saya percaya,” tambahnya. Bantuan yang saat ini Ibu IB terima adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Beliau sedang kondisi sakit dan sangat berharap agar BPJS dapat terus digunakan dan tanpa perlu mengeluarkan biaya iuran pribadi.

H. Penutup

Kota Balikpapan, kota minyak di Kalimantan Timur menjadi salah satu tujuan utama perantau di era 1990-an. Kota ini menyimpan sekelumit kisah pilu di antara pemukiman kumuh tepian pantai yang justru terletak dekat dengan pusat pemerintahan Kota Balikpapan. Kota ini menggambarkan kehidupan keras dan kegigihan perantau di perkebunan. Sudut kota juga menyimpan fakta kerawanan sosial di pemukiman pelabuhan. Perjalanan kajian Regsosek mencoba melihat berbagai realitas dan merekam berbagai kisah warga negara yang membutuhkan afirmasi. Kehadiran negara menjadi penting untuk menjamin dan melindungi warga dari berbagai ancaman kerentanan.

Kehadiran Regsosek memberi harapan baru atas ketersediaan data sosial ekonomi masyarakat yang komprehensif. Keterpaduan dan konsistensi data yang digunakan merupakan prasyarat untuk

mencapai reformasi sistem perlindungan sosial. Regsosek dapat menjadi jawaban dari kegelisahan atas carut marutnya pemberian bantuan sosial. Regsosek mengingatkan para pihak untuk menyediakan jaminan sosial ke masyarakat rentan (lebih tepat sasaran). Dukungan krusial dari kegiatan Regsosek adalah kemampuan dalam melakukan pendekatan valid untuk merekam data warga. Pendataan yang mencakup seluruh penduduk Indonesia dan prinsip dibagi-pakaikan merupakan muara pemersatu para pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat hingga daerah. Pendataan memang ditujukan untuk menghasilkan basis data yang valid. Peningkatan pelayanan dan perjuangan mencapai kesejahteraan masyarakat adalah komitmen selanjutnya yang perlu dijaga para pihak. Kehadiran Regsosek semoga menjadi air menyejukkan yang membawa bangsa ini bangkit jauh lebih kuat.

Daftar Pustaka

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda litbang) Kota Balikpapan. (2021). *Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJDM) Kota Balikpapan tahun 2021–2026*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kota Balikpapan.
- BPS Kota Balikpapan. (2022). *Kota Balikpapan dalam angka 2022*. BPS Kota Balikpapan.
- Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. (2022). *Buku 3 pedoman pendataan lapangan registrasi sosial ekonomi 2022*. Badan Pusat Statistik.
- Google. (t.t.). [Lokasi Kota Balikpapan]. Diakses pada 7 November, 2022, <https://www.google.com/maps/place/Balikpapan,+Balikpapan+City,+East+Kalimantan>